Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 31810-31814

Dinamika Politik Ekonomi dalam Praktik Penarikan Motor oleh Debt Collector di Kota Palembang

Farhan Laksana[1], Taufik Akhyar[2], Siti Anisyah[3]

[1,2,3]Program studi ilmu politk Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Negeri Raden Fatah Palembang

Correspounding Author: Farhan Laksana, email:farhanlaksana7@gmail.com

Published: Juni, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik ekonomi dalam praktik penarikan motor oleh debt collector di Kota Palembang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi praktik tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pihak perusahaan pembiayaan, debt collector, debitur, akademisi, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penarikan motor oleh debt collector tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian kredit bermasalah, tetapi juga melibatkan hubungan kekuasaan dan kepentingan ekonomi antara perusahaan pembiayaan, debt collector, dan debitur. Perusahaan pembiayaan memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas keuangan melalui penurunan tingkat kredit macet, sedangkan debt collector berperan sebagai pelaksana penagihan dan pengamanan aset perusahaan. Dalam praktiknya, sering terjadi ketimpangan posisi antara perusahaan dan debitur yang menimbulkan konflik sosial maupun hukum. Faktor pendukung praktik penarikan kendaraan meliputi regulasi pembiayaan, keberadaan jaminan fidusia, dan kepentingan ekonomi perusahaan. Adapun faktor penghambatnya meliputi penolakan debitur, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta meningkatnya pengawasan terhadap aktivitas debt collector. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penarikan motor oleh debt collector merupakan bagian dari dinamika politik ekonomi yang memperlihatkan hubungan antara modal, kekuasaan, dan hukum dalam sistem pembiayaan kendaraan bermotor di Kota Palembang.

Kata Kunci: Politik Ekonomi, Debt Collector, Kredit Kendaraan Bermotor, Jaminan Fidusia, Palembang.

ABSTRACT

This study aims to analyze the political-economic dynamics in motorcyde repossession practices carried out by debt collectors in Palembang City and identify the factors influencing these practices. The research employed a qualitative descriptive method. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving financing companies, debt collectors, debtors, academics, and community members. The findings indicate that motorcycle repossession practices are not merely related to bad debt settlement but also involve power relations and economic interests among financing companies, debt collectors, and debtors. Financing companies seek to maintain financial stability by reducing non-performing loans, while debt collectors function as executors of debt collection and asset recovery. In practice, unequal positions between companies and debtors often create legal and social conflicts. Supporting factors indude financing regulations, fiduciary guarantees, and corporate economic interests. Inhibiting factors indude debtor resistance, limited public legal awareness, and increased supervision of debt collector activities. The study condudes that motorcyde repossession practices represent political-economic dynamics involving capital, power, and legal mechanisms within the vehide financing system in Palembang City.

Keywords: Political Economy, Debt Collector, Vehide Financing, Fiduciary Guarantee, Palembang

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan industri pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kendaraan melalui sistem kredit. Kehadiran perusahaan pembiayaan menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan modal untuk membeli kendaraan secara tunai. Namun, peningkatan penggunaan kredit kendaraan juga diikuti oleh meningkatnya jumlah kredit bermasalah yang berdampak pada munculnya praktik penarikan kendaraan oleh debt collector.

Di Kota Palembang, praktik penarikan motor oleh debt collector menjadi fenomena yang sering ditemukan. Penarikan kendaraan biasanya dilakukan ketika debitur mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dalam jangka waktu tertentu. Dalam pelaksanaannya, praktik tersebut sering menimbulkan konflik antara debitur dan perusahaan pembiayaan karena adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak.

Dalam perspektif politik ekonomi, praktik penarikan kendaraan tidak hanya berkaitan dengan hubungan hukum antara kreditur dan debitur, tetapi juga menunjukkan adanya relasi kekuasaan antara pemilik modal dan masyarakat. Perusahaan pembiayaan memiliki sumber daya ekonomi, akses hukum, dan dukungan kelembagaan yang lebih besar dibandingkan debitur. Kondisi tersebut menciptakan ketimpangan kekuasaan yang memengaruhi proses penarikan kendaraan.

Menurut Deliarnov (2006), politik ekonomi merupakan kajian mengenai hubungan antara kekuasaan politik dan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Melalui perspektif ini, praktik penarikan motor oleh debt collector dapat dipahami sebagai bentuk interaksi antara kepentingan ekonomi perusahaan dengan mekanisme hukum dan kekuasaan yang tersedia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik ekonomi dalam praktik penarikan motor oleh debt collector di Kota Palembang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi praktik tersebut.

METODE PENELITIAN

Study Participants

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika politik ekonomi yang terjadi dalam praktik penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector di Kota Palembang. Metode kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara perusahaan pembiayaan, debt collector, debitur, serta regulasi yang mengatur proses penarikan kendaraan bermotor. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian dapat menggambarkan berbagai kepentingan ekonomi dan relasi kekuasaan yang memengaruhi praktik penarikan kendaraan di lapangan.

Study Organiation

Penelitian dilaksanakan di Kota Palembang dengan fokus pada praktik penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector pada perusahaan pembiayaan atau leasing. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi berbagai fenomena yang berkaitan dengan interaksi antara aktor-aktor yang terlibat dalam proses penarikan kendaraan bermotor serta dampaknya terhadap masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik penarikan motor oleh debt collector di Kota Palembang.

Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak perusahaan pembiayaan, debt collector, debitur, akademisi, dan masyarakat yang pernah berinteraksi dengan praktik penarikan kendaraan.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber.

Study Analysis

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan debt collector, debitur yang pernah mengalami penarikan kendaraan, pihak perusahaan pembiayaan, akademisi yang memahami isu politik ekonomi dan pembiayaan konsumen, serta aparat penegak hukum yang memiliki keterkaitan dengan penyelesaian sengketa kendaraan bermotor. Data primer ini digunakan untuk memperoleh informasi faktual mengenai praktik penarikan kendaraan dan berbagai faktor yang memengaruhinya.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang mencakup buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi, laporan lembaga terkait, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Beberapa regulasi yang menjadi rujukan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, serta berbagai ketentuan yang mengatur perlindungan konsumen dan kegiatan perusahaan pembiayaan. Data sekunder tersebut digunakan untuk memperkuat analisis serta memberikan landasan teoritis dan yuridis dalam memahami dinamika politik ekonomi yang terjadi dalam praktik penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector di Kota Palembang.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dari para informan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam praktik penarikan kendaraan. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi dan praktik yang terjadi di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen dan arsip yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Melalui tahapan tersebut, penelitian berupaya menghasilkan gambaran yang objektif mengenai dinamika politik ekonomi dalam praktik penarikan motor oleh debt collector di Kota Palembang

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan debt collector, debitur, pihak perusahaan pembiayaan seperti FIF, Adira Finance, dan perusahaan leasing lainnya yang beroperasi di Kota Palembang. Selain itu, observasi lapangan juga dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai praktik penagihan dan penarikan kendaraan.

Data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen perusahaan pembiayaan, serta berbagai sumber lain yang berkaitan dengan politik ekonomi dan praktik debt collector.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Politik Ekonomi dalam Praktik Penarikan Motor oleh Debt Collector di Kota Palembang

Praktik penarikan motor oleh debt collector merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Dalam praktiknya, proses penarikan kendaraan tidak hanya berkaitan dengan persoalan administratif, tetapi juga mencerminkan adanya hubungan kekuasaan antara perusahaan pembiayaan dan debitur.

Perusahaan pembiayaan memiliki kepentingan ekonomi untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Tingginya angka kredit macet dapat memengaruhi keuntungan dan keberlangsungan usaha perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan menggunakan debt collector sebagai instrumen untuk melakukan penagihan dan pengamanan aset.

Keberadaan debt collector menunjukkan bagaimana kekuatan ekonomi diterjemahkan ke dalam tindakan di lapangan. Debt collector bertindak sebagai representasi kepentingan perusahaan dalam memastikan kewajiban debitur dapat dipenuhi.

Dalam perspektif politik ekonomi, kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan antara perusahaan pembiayaan dan debitur. Perusahaan memiliki akses terhadap modal, regulasi, dan dukungan kelembagaan yang lebih besar dibandingkan debitur. Akibatnya, debitur sering berada dalam posisi yang lebih lemah ketika menghadapi proses penagihan dan penarikan kendaraan.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Praktik Penarikan Motor oleh Debt Collector

Faktor Pendukung

Faktor pendukung praktik penarikan kendaraan meliputi keberadaan regulasi mengenai pembiayaan kendaraan bermotor, sistem jaminan fidusia, dukungan administrasi perusahaan pembiayaan, serta kepentingan ekonomi perusahaan dalam menjaga kelancaran pembayaran kredit.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang memudahkan pelacakan data debitur juga menjadi faktor yang mendukung efektivitas proses penagihan dan penarikan kendaraan.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat praktik penarikan kendaraan meliputi penolakan dari debitur, rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat, meningkatnya pengawasan aparat penegak Hukum Hambatan lainnya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak konsumen sehingga perusahaan pembiayaan harus lebih berhati-hati dalam melakukan penarikan kendaraan agar tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku

KESIMPULAN

Dinamika politik ekonomi dalam praktik penarikan motor oleh debt collector di Kota Palembang menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara perusahaan pembiayaan, debt collector, dan debitur. Praktik tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian kredit bermasalah, tetapi juga mencerminkan adanya relasi kekuasaan yang dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi perusahaan dan regulasi yang berlaku.

Faktor pendukung praktik penarikan kendaraan meliputi regulasi pembiayaan, jaminan fidusia, dan kepentingan ekonomi perusahaan. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi rendahnya literasi hukum masyarakat, penolakan debitur, serta meningkatnya pengawasan terhadap aktivitas debt collector.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan konsumen, peningkatan pemahaman hukum masyarakat, dan pengawasan yang lebih efektif terhadap praktik debt collector agar tercipta keseimbangan antara kepentingan perusahaan pembiayaan dan hak-hak debitur.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh informan penelitian, pihak perusahaan pembiayaan, debt collector, debitur, serta Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah memberikan dukungan selama proses penelitian berlangsung

KESIMPULAN

Dinamika politik ekonomi dalam praktik penarikan motor oleh debt collector di Kota Palembang menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara perusahaan pembiayaan, debt collector, dan debitur. Praktik tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian kredit bermasalah, tetapi juga melibatkan kepentingan ekonomi, kekuasaan, dan regulasi yang berlaku.

Perusahaan pembiayaan memanfaatkan debt collector sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas bisnis dan meminimalkan risiko kerugian akibat kredit macet. Sementara itu, debitur sering berada pada posisi yang lebih lemah karena keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan hukum.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan konsumen, peningkatan literasi hukum masyarakat, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik debt collector agar tercipta keseimbangan antara kepentingan perusahaan pembiayaan dan hak-hak debitur

REFERENCES

Deliarnov. 2006. Ekonomi Politik. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Moleong, Lexy J. 2021. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Otoritas Jasa Keuangan. 2018. Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Pemerintah Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Prasetyo, D. 2022. Pengawasan OJK terhadap Praktik Debt Collector pada Perusahaan Pembiayaan. Jurnal Kebijakan Publik.

Lestari, R. 2023. Perspektif Politik Ekonomi dalam Industri Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Jurnal Politika.

reswell, J. W. (2018). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Methods. Yogyakarta: Pustaka Pelajar